



Penyusunan Standar Operasional Prosedur Resiko Bisnis Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Aneka

Rizky Adithya^{*1}, Linda Suherma², Kartawati Mardiah³, Yani Riyani⁴, Susan Andriana⁵, Baidhillah Riyadhi⁶, Agus Widodo⁷, Endang Kusmana⁸, Haryati⁹

Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia, 78124

E-mail: rizkyadithya59@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2131>

Info Artikel:

Diterima :
2024-11-23

Diperbaiki :
2025-03-05

Disetujui :
2025-03-05

Kata Kunci : bisnis, tata kelola, resiko

Abstrak: Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan BUMD milik Provinsi Kalimantan Barat yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang penjualan lumbung pangan, penyediaan barang dan jasa dan jasa lainnya. Namun belum terdapat pedoman pengukuran kinerja dan standar operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan banyak aset tetap milik perumda yang disewakan kepada masyarakat sehingga bertentangan dengan Perda Kalbar Nomor 3 Tahun 2023 dan menjadi temuan dalam audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP. Tujuan dilaksanakan PKM ini : 1). Meningkatkan peran manajemen Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penyusunan pedoman audit kinerja; 2). Penyusunan SOP resiko bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya resiko yang dihadapi oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat serta sebagai tindak lanjut yang belum dilaksanakan. Pelaksanaan PPM ini dilakukan dengan berkoordinasi unit terkait. Hasil dari kegiatan PPM ini yakni tersusunnya pedoman audit kinerja dan SOP pengukuran kinerja.

Abstract: Perumda Aneka Usaha West Kalimantan Province is a BUMD belonging to West Kalimantan Province which carries out business activities in the field of selling food storage, providing goods and services and other services. However, there are no performance measurement guidelines and operational standards for running this business. This is because many fixed assets belonging to Perumda are leased to the public, which is in conflict with West Kalimantan Regional Regulation Number 3

Keywords: *business, governance, risk*

of 2023 and is often a finding in performance audits carried out by BPKP. The objectives of implementing this PKM are: 1). Increasing the role of the management of Perumda Aneka Usaha West Kalimantan Province in preparing performance audit guidelines; 2). It is hoped that the preparation of business risk SOPs can improve performance and prevent risks faced by Perumda Aneka Usaha West Kalimantan Province and as a follow-up to audit findings that have not been implemented. The implementation of PPM is carried out in coordination with related units. The result of this PPM activity is the preparation of performance audit guidelines and performance measurement SOPs.

Pendahuluan

Adanya pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah dilakukan supaya Pemerintah daerah mampu mengurus sendiri urusan rumah tangganya yakni dengan mengoptimalkan sumber potensi pendapatan daerah. Guna mewujudkan hal tersebut maka perlu tolok ukur untuk menilai kinerja birokrasi pemerintah dalam menilai kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan tersebut sulit dilakukan mengingat perbedaan sudut pandang pelayanan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Pengukuran kinerja pemerintah berdasarkan standar pelayanan prima, pada sudut pandang masyarakat pelayanan dianggap baik jika memenuhi rasa puas mereka. Semakin besar tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas maka instansi beserta seluruh jajaran dituntut untuk melakukan pembenahan dalam berbagai sektor pelayanan. Usaha itu ditunjukkan dengan berbagai usaha agar pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah agar lebih profesional dan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat yakni usaha lumbung pangan serta usaha penyewaan kios untuk UMKM. Seperti yang kita ketahui kebutuhan akan pangan dinilai sangat urgen. Setelah pandemi covid-19 banyak masyarakat dirumahdinikan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Guna memenuhi kebutuhan, mereka membuka usaha namun terkendala dengan mahalnya penyewaan kios serta tempat yang dinilai kurang strategis. Ditambah lagi yang pada akhir-akhir ini harga kebutuhan pangan pasca pemilu 2024 melambung naik sehingga menambah beban yang harus ditanggung.

Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan badan usaha milik daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah

Aneka Usaha Tingkat I Kalimantan Barat. Namun terkait dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bentuk perusahaan daerah terbagi menjadi dua yakni perseroan daerah dan perusahaan umum daerah. Maka Perusahaan ini telah berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Perubahan Status Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah ini mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023

Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha beberapa diantaranya dalam bidang usaha penjualan lumbung pangan, penyediaan barang dan jasa (jasa penyewaan kios, jasa travel, usaha penjualan ATK dan percetakan serta jasa area parkir). Berdasarkan (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, 2023), dalam mengoperasikan usahanya harus berdasarkan standar operasional prosedur salah satunya resiko bisnis. Namun dalam menjalankan kegiatannya, manajemen Perumda belum menyusun Pedoman pengukuran kinerja serta Standar Operasional terkait resiko bisnis. Hal tersebut setiap tahunnya selalu menjadi temuan audit BPKP. Hal ini dinilai wajar dikarenakan manajemen kinerja mempunyai manfaat diantaranya melindungi dan mengamankan aset perusahaan dari resiko signifikan, memberikan kerangka kerja manajemen dalam mengantisipasi resiko yang ada pada proses bisnis dan mendorong individu di perusahaan agar lebih berhati-hati dan mengoptimalkan nilai perusahaan dan para *owner* saham (*shareholders*) serta memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya (Khristian, 2021).

SOP dianggap dapat menolong sistem tata kelola lembaga supaya lebih efektif dan efisien dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi aparatur negara dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan masyarakat dapat meningkat (LPMP UIN Banda Aceh, 2022). Manajemen risiko berawal dari tahap identifikasi, analisis, evaluasi, kelola, pemantauan, dan melaporkan risiko yang ada pada kegiatan, fungsi, atau proses, di mana risiko tersebut dapat dimitigasi oleh UMKM supaya dapat mengurangi kerugian dan maksimalkan peluang (Pangestuti, Dewi Cahyani, 2024). Manajemen resiko menciptakan keamanan dan kenyamanan dari setiap layanannya, sehingga dapat meminimalkan tingkat resiko yang dihadapi para konsumen maupun pedagang pasar (Iriani, SS, 2021).

Jika perusahaan menjalankan manajemen risiko, maka akan memperoleh point lebih dalam bisnis perusahaan (Pradana, 2014). Jika perusahaan mampu mengelola resiko hal itu menjadi kunci penting untuk memperoleh laba laba bagi badan usaha

(Adithya,2022). Selain itu, penerapan manajemen risiko mengatasi masalah perusahaan dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan keseimbangan para pemangku kepentingan serta menjaga kebijakan dan aset kepemilikan perusahaan (Maya, 2022).

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan khususnya Perumda Aneka Usaha dalam menyusun pedoman manajemen resiko serta Standar Operasional agar dapat mewujudkan *good corporate governance* sesuai dengan ketentuan Perda Kalbar No 3 Tahun 2023.

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan kegiatan dibutuhkan metode pelaksanaan kegiatan PKM sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan:

1. Persiapan/Survey.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan melakukan pemetaan masalah yang ada pada suatu organisasi (Riyani, et.al, 2022). Masalah yang ada pada PKM yakni belum adanya pedoman manajemen resiko dan SOP untuk melakukan pengukuran kinerja dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

2. Pengantaran surat

Setelah melakukan pemetaan masalah yang ada. Tim PKM mengajukan surat pelaksanaan PKM yang diterbitkan oleh pimpinan Politeknik Negeri Pontianak kepada pimpinan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sebagai tempat dilaksanakannya PKM ini.

3. Pelaksanaan kegiatan PKM

Setelah pengantaran surat dilakukan, tim PKM menunggu disposisi surat dari Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dan menyusun jadwal dengan bagian terkait untuk pelaksanaan PKM. Metode pelaksanaan PKM ini yakni dengan kualitatif dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman audit kinerja dan SOP Pengukuran kinerja dengan merujuk pada bukti-bukti relevan (Adithya, R. 2024)

b. Tahapan Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan PKM dilakukan dengan melakukan Pendampingan Membuat Pedoman Audit Kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja. Seluruh kegiatan diikuti oleh pengurus Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat karena mereka

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan prima untuk mewujudkan good corporate governance (Nurhikmahyanti, 2017).

2. Pelaksanaan penyusunan pedoman audit kinerja dilakukan dengan merujuk pada Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.
3. Pelaksanaan penyusunan SOP dilakukan dengan merujuk pada pelaksanaan yang dilakukan dilapangan yang di triangulasikan dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dan peraturan yang berlaku

c. Tahapan Diseminasi

1. Tahapan diseminasi.

Perumda Aneka Usaha biasa menyusun SOP, Namun, SOP terkadang tidak pernah di kaji dan tidak pernah dijelaskan pada seluruh karyawan. Jadinya dalam menjalankan perusahaan jarang dijadikan referensi. Akibatnya karyawan bekerja sesuai pemahaman mereka pribadi (Zahrawani, 2021). Diseminasi PKM ini dilakukan bersama dilakukan oleh kepala bidang administrasi dan personalia serta bagian umum dan keuangan terkait semua proses dari awal kegiatan sampai akhir pelaksanaan kegiatan PKM dengan cara berdiskusi, dan curah pendapat dalam pertemuan. Dari hasil pertemuan dijadikan dasar Mitra mengambil kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut;

2. Perumda Aneka Usaha menjadi mitra Politeknik Negeri Pontianak untuk pelaksanaan PKM. Hal tersebut dibuktikan dengan **Perjanjian Kerjasama** antara kedua belah pihak. Adapun tahapan pelaksanaan pada masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat, tim PPM melakukan survei akan kebutuhan yang diperlukan oleh Perusahaan Umum Daerah

Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sebagai klien dalam PKM ini. Koordinasi dilakukan kepada Tim PKM melakukan koordinasi dengan ibu Cornelia Arylucianti, SE.MM.Ak selaku kepala Bidang Umum dan Keuangan dan Bapak Rian Fahlevi, S.Sos selaku Kepala Bidang administrasi dan personalia. Setelah melakukan survei langkah selanjutnya peneliti melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan yakni melakukan pengajuan usulan PPM untuk selanjutnya pelaksanaan berupa koordinasi dengan pihak yang terlibat untuk memberikan data terkait penyusunan pedoman audit kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja. Penyusunan pedoman audit kinerja dan SOP pengukuran kinerja dilakukan agar nantinya perusahaan dapat melakukan menilai serta memproyeksikan kerugian yang bakal terjadi serta cara mengatasi resiko yang terjadi (Yosef, 2018). Adapun adanya standar operasional berguna dalam mengatur kegiatan usaha agar tertata dengan baik sehingga memaksimalkan pendapatan sebagai outcome atas kegiatan operasional yang telah dijalankan (Riyani,et.al, 2021).



Gambar 2. Foto Pelaksanaan PKM dengan Klien

Tim PKM Tim PPM melakukan pengumpulan data terkait data untuk penyusunan pedoman audit kinerja dan manajemen resiko berupa Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, serta data-data SOP pelaksanaan usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Dalam menyusun pedoman audit kinerja berpedoman pada Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Adapun output PKM ini berupa pedoman audit kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPM yang dilaksanakan oleh tim PPM bersama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Resiko Bisnis Guna Mewujudkan Good Corporate Governance sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dengan cara melakukan pendampingan penyusunan pedoman audit kinerja dan SOP pengukuran kinerja yang diharapkan dapat menindaklanjuti temuan audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP.

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada kata yang pantas diucapkan, kecuali memuji kebesaran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dalam pelaksanaan kegiatan PPM ini kami tim PPM menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa bantuan materi, moril dan doa kepada:

1. Bapak H. Syariful Hamzah Naully, S.IP.M.AP selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan waktu dan kesempatan bagi im PPM melakukan diseminasi hasil PPM.
2. Ibu Susanti, SH, MH selaku Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Aneka Usaha Kalbar
3. Bapak Rian Fahlevi, S.Sos selaku Ka. Bagian Administrasi dan Personalia
4. Ibu Cornelia Arylucianti, SE.MM.Ak selaku Ka Bagian Umum dan Keuangan
5. Ibu Dr. Belvi Vatria, A.Pi, M.Si selaku Kepala P3M Politeknik Negeri Pontianak
6. Bapak Dr. Baidhillah Riyadhi, M.Ag selaku Kasub PPM Politeknik Negeri Pontianak
7. Ibu Dr. Yani Riyani SE, M.SA selaku ketua jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.

Referensi

- Adithya, R., Sari, W., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal E-Bis*, 6(1), 313–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.881>
- Adithya, R., Suherma, L., Andriana, S., Riyani, Y., Mardiah, K., Riyadhi, B., Kurniasih, N., Rynandi, O., Haryati, H., & Andini, R. (2024). Peningkatan Kemampuan Tenaga Akuntansi Dalam Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Islam Tahfizhul Qur'an Kabupaten Kubu Raya. *Kapuas*, 4 (1), 33–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/jk.v4i1.648>
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tingkat I Kalimantan Barat., (1988).
- Iriani, SS, et. a. (2021). Pendampingan Pemetaan Manajemen Resiko Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Sidoarjo. *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (2), 123–131. <https://journal.inspirasi.or.id/jppm/article/view/99>
- Khristian, E. E. a. (2021). Analisis Manajemen Resiko Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT Angkasa Pura (Persero). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* Universitas Negeri Sam Ratulangi, 12 (2), 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.35855>
- Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Banda Aceh. (2022). Laporan Review dan Pelatihan Penyusunan SOP.
- Nurhikmahyanti, D. (2017). Implementasi Tata Kelola Layanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Perguruan Tinggi. *Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2 (1), 24–32. <https://core.ac.uk/download/pdf/287321273.pdf>
- Pangestuti, Dewi Cahyani, E. a. (2024). Pendampingan Pengelolaan Risiko Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Keberlanjutan Bisnis. *Ta'awun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (1), 11–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.37850/taawun.v4i01.527>
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, 67 (2023).

- Pradana, Y. dan R. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13, No. 2, 195–204.
<https://pdfs.semanticscholar.org/6fb2/c9ea707f7e18cc25ca3afe687e8a202e7969.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, 1 (2017).
- Sari, M. E. a. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 6 N, 1541–1554.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>
- Yani Riyani, Linda Suherma, Rizky Adithya, Kartawati Mardiah, Susan Andriana, Desty Wana, & H. (2021). Penataan Kelembagaan Bumdes Bintang Baru Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Mewujudkan Bumdesa Penyangga Di Kabupaten Kubu Raya. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 548–558. <https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/jurpikat/article/view/756%0A>
- Yani Riyani, Rizky Adithya, Linda Suherma, Kartawati Mardiah, Susan Andriana, Baidhillah Riyadhi, Oscar Rynandi, Henri Parsetyo, Haryati, & W. (2022). Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parit Baru. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat)*, 3 (3), 577–583.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i3.1045>
- Yosef, D. (2018). Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 10 (2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37477/bip.v10i2.60>
- Zahrawani, dan S. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799–1818.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>